

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, tinjauan pustaka yang akan disajikan penulis yaitu beberapa kerangka pemikiran dan tinjauan hipotesis. Tinjauan pustaka ini menyajikan beberapa teori-teori yang menggambarkan konsep dari variabel yang diteliti dengan penelitian terdahulu sebagai acuan atau perbandingan dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, penyusunan penelitian ini membahas kerangka pemikiran teoritis yang menjelaskan mengenai model serta hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Diikuti dengan hipotesis atau dugaan sementara mengenai penelitian yang dilakukan.

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan mengukur seberapa merata pendapatan (atau kesejahteraan) itu didistribusikan. Pertumbuhan ekonomi biasa tinggi jika pendapatan rata-rata meningkat walaupun yang meningkat pendapatannya hanya sekelompok orang. Pendapatan rata-rata juga bisa saja meningkat pesat jika suatu kelompok mengalami penurunan pendapatan tetapi kelompok lain mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi. Ketimpangan mengukur kesenjangan antara kelompok yang paling kaya dengan yang paling miskin (Mara & Rambey, 2018).

Sjafrizal (2008) menyatakan ketimpangan pendapatan ekonomi merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara.

Terdapat kecenderungan bahwa kebijakan pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi justru memperburuk kondisi kesenjangan ekonomi antar wilayah, karena beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat. Hal ini telah memicu migrasi penduduk dari wilayah terbelakang ke wilayah maju. Selain itu, kemajuan perekonomian yang tidak merata di setiap wilayah dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang memicu terjadinya konflik. Apabila dibiarkan semakin parah, dapat mengganggu kestabilan perekonomian negara.

Berdasarkan pandangan Neo-klasik dalam Sjafrizal (2008), pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Apabila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan antar wilayah akan menurun. Hal tersebut karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai, peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik. Sedangkan, daerah yang tertinggal tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi lebih cepat di daerah dengan kondisinya lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan, maka kesenjangan ekonomi antarwilayah cenderung meningkat.

Menurut Todaro dalam jurnal Permana (2016), distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah baik yang diterima masing-masing individu ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Ketimpangan pendapatan lebih besar terjadi pada daerah-daerah yang baru memulai pembangunan, sedangkan bagi daerah maju atau lebih tinggi tingkat pendapatannya cenderung merata atau tingkat ketimpangannya lebih rendah.

2.1.1.1 Pengertian Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan kemiskinan. Ketimpangan yang tinggi lambat laun akan menjadi penghambat dalam pertumbuhan ekonomi, hal tersebut akan mengakibatkan suatu negara tidak mampu keluar atau terjebak dalam kelompok pendapatan kelas menengah.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu negara dan sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksi ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, yang paling umum biasanya menggunakan indeks gini.

Menurut Todaro (2003), ketimpangan pendapatan adalah perbedaan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat. Akibatnya yang akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembaguan hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya.

Menurut Kuncoro (1997), ketimpangan pendapatan merupakan standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia.

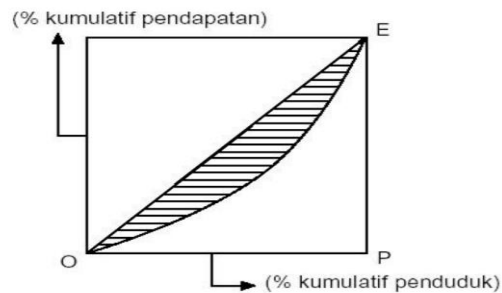
Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari ketimpangan pendapatan adalah sebuah permasalahan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara, terutama yang berhubungan dengan perbedaan pendapatan masyarakat semua golongan.

2.1.1.2 Indikator Ketimpangan Pendapatan

Untuk mengukur dan mengetahui tingkat ketimpangan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dapat digunakan beberapa metode diantaranya yaitu:

1. Kurva Lorenz

Gini ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan distribusi penduduk. Hal ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi suatu variabel tertentu (seperti pendapatan) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Dalam kurva Lorenz, semakin jauh garis yang ditunjukkan dari garis optimum maka ketimpangan yang digambarkan oleh kurva tersebut semakin besar.



Sumber: Berkas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2017)

Gambar 2. 1 Kurva Lorenz

Gambar di atas menunjukkan, sumbu horizontal menggambarkan persentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertikal menggambarkan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase penduduk tersebut. Garis diagonal di tengah disebut “garis pemerataan sempurna”. Hal ini karena setiap titik pada garis diagonal merupakan persentase penduduk yang sama dengan persentase pendapatan yang diterima.

Semakin jauh garis kurva Lorenz dari garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi. Sebaliknya semakin dekat kurva Lorenz ke diagonal, maka tingkat pemerataan pendapatan semakin tinggi. Pada gambar diatas besarnya ketimpangan digambarkan oleh daerah yang diarsir. Dengan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Gini Ratio mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Gini Rationya makin mendekati satu

Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase jumlah penduduk penerima pendapatan tertentu dari total penduduk dengan

persentase pendapatan yang benar-benar mereka peroleh dari total pendapatan selama waktu tertentu. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal, maka kesenjangan atau disparitas pendapatan yang terjadi akan semakin lebar. Sebaliknya apabila kurva Lorenz semakin dekat dengan garis diagonal, maka disparitas yang terjadi semakin kecil (Todaro, 1998). Ketimpangan yang tidak sempurna yaitu apabila hanya seorang saja yang menerima seluruh pendapatan nasional, sementara orang-orang lainnya sama sekali tidak menerima pendapatan. Oleh karena itu, tidak ada satu negara pun yang memperlihatkan pemerataan sempurna atau ketidakmerataan sempurna di dalam distribusi pendapatannya, semua kurva Lorenz dari setiap negara akan berbeda di sebelah kanan garis diagonal.

2. Koefisien Gini

Koefisien gini (*gini ratio*) adalah ketidakmerataan atau kesenjangan pendapatan ataupun kesejahteraan secara agregat (keseluruhan). *Gini ratio* tidak bisa lepas dengan kurva Lorenz karena *gini ratio* merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal dan kurva Lorenz. Jika angka *gini ratio* mendekati 0, maka distribusi pendapatan semakin merata, sebaliknya bila mendekati 1, maka distribusi pendapatan semakin tidak merata.

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai gini ratio adalah:

$$G = \frac{1 - i \sum P_i (Q_i + Q_{i-1})}{k}$$

Dimana:

G = *Gini Ratio*

P_i = Perentase kelompok pada kelas pendapatan ke-i

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i

K = Banyaknya kelas pendapatan

3. Kriteria bank Dunia (*size distribution*)

Bank dunia membagi pendapatan kedalam tiga kelompok. Pembagian

ketimpangan kedalam tiga kelompok menurut bank dunia adalah:

- 1) Ketimpangan tinggi, jika 40 persen dari populasi pendapatan terendah kurang dari 12 persen dari pendapatan nasional.
- 2) Ketimpangan moderat, jika 40 persen dari populasi pendapatan terendah menerima sekitar 12 sampai 17 persen dari pendapatan nasional.
- 3) Ketimpangan rendah, jika 40 persen dari populasi pendapatan menerima 17 persen atau lebih dari pendapatan nasional.

4. Indeks Williamson

Williamson menilai tingkat kesenjangan di berbagai negara yang mempunyai tingkat perkembangan dengan memperkenalkan Indeks Williamson. Indeks Williamson adalah suatu modifikasi dari standar deviasi yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan perkapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan perkapita nasional.

Rumus Indeks Williamson:

$$IW = \frac{\sqrt{\frac{\sum (y_i - r)^2 n_i}{n}}}{y}$$

Dimana:

IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB perkapita

Y = PDB perkapita

n_i = Jumlah penduduk Provinsi

n = Jumlah penduduk Nasional

2.1.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan

Faktor-faktor penyebab ketimpangan pendapatan antar wilayah menurut (Sjafrizal, 2008), diantaranya sebagai berikut:

1) Perbedaan kandungan sumber daya alam

Perbedaan kandungan SDA akan mempengaruhi kegiatan produksi daerah bersangkutan, daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relative murah, kondisi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lambat.

2) Perbedaan kondisi demografis

Perbedaan kondisi demografis ini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

3) Kurang lancarnya mobilitas dan jasa

Mobilitas dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik itu disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual kedaerah lain yang membutuhkan. Akibatnya, adalah ketimpangan

pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit untuk mendorong proses pembangunannya.

4) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu wilayah dimana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

5) Alokasi pembangunan antar wilayah

Alokasi dana ini berasal dari pemerintah ataupun swasta. Pada sistem pemerintah otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga dapat menekan tingkat ketimpangan. Sedangkan untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transport baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investasi akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

Adelman & Morris (1973) mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penyebab ketimpangan pendapatan di negara-negara yang sedang berkembang, yaitu:

- a. Tingginya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada penurunan pendapatan perkapita.

- b. Terjadinya inflasi
- c. Banyak investasi proyek-proyek yang padat modal sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari pekerja, maka pengangguran bertambah.
- d. Mobilitas sosial yang rendah.

Penyebab ketimpangan pendapatan yang seringkali terjalin dengan faktor makroekonomi yang lebih luas di antara faktor-faktor yang bertanggung jawab atas ketidaksetaraan pendapatan meliputi:

- a. Distribusi Kekayaan yang miring

Kekayaan didistribusi secara tidak merata, dengan beberapa individu atau kelompok mengendalikan proporsi yang signifikan dari total kekayaan. Ini membuat banyak individu lain dengan sedikit kekayaan dan sering mengakibatkan ketidaksetaraan pendapatan. Orang-orang terkaya biasanya dapat menginvestasikan sumber daya mereka untuk memanfaatkan kekuatan kekayaan, mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, dan mengumpulkan bagian pendapatan yang lebih besar.

- b. Kemajuan teknologi

Inovasi teknologi telah menyebabkan substitusi tenaga kerja dengan mesin, yang telah mengakibatkan pemindahan pekerjaan dan pengurangan upah untuk pekerja berketerampilan rendah. Kemajuan teknologi juga telah menyebabkan terciptanya industri baru, seperti teknologi informasi, yang membutuhkan tenaga

kerja khusus, yang mengarah pada permintaan yang lebih signifikan untuk pekerja terampil dan meningkatkan kesenjangan upah.

c. Globalisasi

Globalisasi ditandai dengan meningkatnya pergerakan barang, modal, dan orang-orang lintas batas yang mengakibatkan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Misalnya, perjanjian perdagangan internasional telah menciptakan peluang bagi perusahaan multinasional untuk melakukan *outsourcing* produksi mereka ke negara-negara dengan tenaga kerja yang lebih murah, yang mengarah pada perpindahan pekerja lokal dan pengurangan upah. Pada saat yang sama, globalisasi telah meningkatkan permintaan pekerja yang sangat terampil di negara maju, yang mengakibatkan kesenjangan yang melebar antara kaya dan miskin.

d. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah yang berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan misalnya, kebijakan pajak, yang telah dirancang untuk menguntungkan orang kaya, telah menghasilkan konsentrasi kekayaan di tangan beberapa individu atau kelompok. Selain itu, pengurangan pengeluaran untuk barang-barang publik seperti pendidikan dan perawatan kesehatan memiliki peluang terbatas bagi individu berpenghasilan rendah, yang semakin meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan.

2.1.1.4 Dampak ketimpangan

Dampak dari masalah ketimpangan menjadi sangat kompleks tidak hanya menghambat pada proses pembangunan ekonomi, tetapi juga berimbas pada lingkungan budaya, politik, dan sosial. Ketimpangan telah meningkatkan urbanisasi

masyarakat dari wilayah pedesaan menuju wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh selisih antara tingkat pendapatan yang diharapkan dan kemungkinan mendapatkan pekerjaan di perkotaan lebih besar daripada di daerah pedesaan Todaro & Smith (2006). Dengan pola pikir seperti itu, masyarakat desa mulai beralih ke wilayah perkotaan dengan harapan mendapat upah yang lebih besar dan penghidupan yang lebih layak.

Adanya dampak ketimpangan yang tinggi antara kelompok kaya dengan miskin menurut Todaro & Smith (2006) akan menimbulkan setidaknya dua dampak negatif yaitu:

- 1) Terjadinya *inefisiensi* ekonomi. Hal ini dikarenakan semakin banyak penduduk yang kesulitan mengakses kredit terutama penduduk miskin, sedangkan penduduk kaya cenderung lebih konsumtif untuk barang mewah.
- 2) Melemahnya stabilitas dan solidaritas sosial. Disparitas atau ketimpangan antar wilayah antara perbedaan tingkat pertumbuhan antar wilayah. Setiap daerah selalu memiliki wilayah yang maju secara ekonomi dan ada wilayah yang tertinggal. Perbedaan ini terletak pada perkembangan sektor ekonominya, baik sektor pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Ketimpangan pendapatan juga memiliki dampak terhadap faktor-faktor makroekonomi seperti:

1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dari waktu ke waktu. Ketimpangan pendapatan dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar penduduk dengan pendapatan rendah berarti mereka memiliki kapasitas rendah untuk membeli barang dan jasa. Hal tersebut akan menghasilkan permintaan agregat yang rendah, yang akan mengurangi produksi barang dan jasa, sehingga mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2. Inflasi

Inflasi mengacu pada kenaikan tingkat harga umum barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Ketimpangan dapat menyebabkan inflasi jika orang kaya cenderung menabung lebih dari orang miskin. Ketika orang kaya menyimpan uang mereka, akan ada pengurangan pasokan uang dalam perekonomian, yang dapat menyebabkan inflasi. Selain itu, individu berpenghasilan tinggi mampu mendorong harga barang dan jasa tertentu ke atas, berkontribusi pada kenaikan tingkat harga umum.

3. Tingkat pekerjaan

Pekerja yang dihasilkan dari kemajuan teknologi dan globalisasi telah mengakibatkan pelebaran ketidaksetaraan ekonomi dan berkurangnya peluang kerja bagi individu berketerampilan rendah. Selain itu, konsentrasi kekayaan di tangan

beberapa individu mengurangi permintaan mereka akan tenaga kerja, mengurangi tingkat kerja secara keseluruhan dalam suatu perekonomian.

2.1.1.5 Penanggulangan Ketimpangan

Untuk mengatasi ketimpangan pendapatan membutuhkan solusi terintegrasi yang melibatkan langkah-langkah jangka panjang yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi.

1. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan dapat memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Pendanaan publik dan akses ke pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan keterampilan individu, yang mengarah pada potensi penghasilan yang lebih besar. Kebijakan Pendidikan akan berfokus pada peningkatan akses ke pendidikan di daerah yang kekuarangan dan memastikan pendidikan berkualitas di sekolah umum.

2. Kebijakan pajak progresif

Untuk mengatasi ketidaksetaraan pendapatan dengan mendistribusikan kembali kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Hal ini dapat dicapai melalui tarif pajak progresif, dimana penerima berpenghasilan lebih tinggi dikenakan pajak daripada penerima berpenghasilan rendah.

3. Upah minimum

Pembentukan upah minimum dapat membantu mengekang ketimpangan pendapatan. Administrasi harus menetapkan tingkat upah minimum yang akan memungkinkan individu berketerampilan rendah untuk mendapatkan upah layak.

Selain itu, pemerintah harus menghalangi perusahaan untuk menetapkan upah di bawah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendorong keadilan dipasar tenaga kerja.

4. Program kesejahteraan sosial

Program kesejahteraan sosial, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan jaring pengaman sosial, dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan pendapatan. Jaring pengaman sosial, seperti asuransi pengangguran, dapat membantu mereka yang kehilangan pekerjaan karena kemajuan teknologi atau globalisasi.

2.1.2 Indeks Persepsi Korupsi

Indeks persepsi korupsi merupakan hasil pengukuran yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 1995, yang dikenal baik sebagai alat *Transparency International* (TI). TI membentuk sebuah komite yang bernama *Indeks Advisory Committee* (IAC) pada tahun 1996 untuk memberikan masukan dengan alat ukur korupsi yang global. Anggota dari komite (anggota IAC) terdiri ahli ekonomi, statistic, ilmu sosial dan politik. Indeks persepsi korupsi merupakan data yang menggambarkan tingkat peluang terjadinya korupsi di negara tertentu.

Transparency international mendefinisikan korupsi sebagai penggunaan kekuasaan publik, baik oleh politisi atau pejabat pemerintah, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau mereka dekat dengannya melalui penyalahgunaan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan menurut *World Bank* korupsi adalah penyalahgunaan kekuatan publik untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini kepentingan pribadi yang dimaksud bukan hanya

secara individu, melainkan juga terhadap keluarga, teman, partai politik, maupun kelompok tertentu dalam masyarakat.

Berdasarkan *Transparency International* indeks persepsi korupsi merupakan sebuah indikator komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara dan wilayah berdasarkan kombinasi dari 13 survei global dan penilaian korupsi menurut persepsi pelaku usaha dan penilaian ahli sedunia sejak tahun 1995.

Korupsi merupakan aktivitas yang menawarkan, memberi, menerima, atau meminta baik secara langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak benar. Korupsi dapat menjadi hambatan besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial dan juga mengacaukan pembangunan dengan melakukan distorsi peraturan atau hukum serta melemahkan landasan institusional dimana pertumbuhan ekonomi bergantung.

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindakan korupsi, dalam memberi atau menerima suap, pemerasan dan penggelapan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau pengelola negara.

Korupsi terjadi di negara berkembang karena tersedianya kesempatan untuk elite memperkaya diri. Teori mengenai biasanya menghubungkan antara kesempatan untuk memperkaya diri dengan berbagai variabel termasuk sejauh mana pembangunan ekonomi, khususnya sejarah dan latar belakang budaya, perkembangan politik, tingkat pendidikan, dan administrasi sistem hukum. Meskipun bervariasi, teori ini setuju bahwa kesempatan untuk korupsi dalam suatu masyarakat ditentukan

oleh sejauh mana masyarakat mungkin menyeimbangkan antara risiko dengan kemungkinan manfaat dari tindakan korupsi dalam konteks psikologis, sosial, dan finansial. Negara-negara yang memiliki sistem hukum, ekonomi, politik, dan sosial yang dapat memaksimalkan kemungkinan risiko (seperti risiko tertangkap dan dihukum) cenderung memiliki lebih sedikit korupsi. Dalam hal ini, korupsi yang tinggi di negara-negara berkembang sering diasosiasikan dengan adanya dominasi hirarki dan otoritas dari orang-orang tertentu yang kebal hukum yang mengurangi efektivitas system mereka dalam melestarikan tatanan sosial (Treisman, 2000).

Praktik korupsi yang terjadi dianggap sebagai penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan. Adanya korupsi menyebabkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan, menyediakan infrastruktur dan memperluas lapangan kerja menjadi berpindah kepada oknum pemerintah yang melakukan tindak korupsi. Hal ini menyebabkan kondisi penduduk miskin semakin terpuruk (Darmayadi, 2015).

Transparency International Indonesia meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dengan mencoba mengukur persepsi pelaku usaha terhadap praktik korupsi di suatu daerah. IPK diharapkan dapat dijadikan petunjuk awal permasalahan korupsi di suatu daerah dan dapat digunakan untuk mendesai strategi pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien. IPK Indonesia melihat sejauh mana kualitas tata kelola institusi publik dengan menanyakan langsung kepada para pelaku usha berdasarkan pengalaman atau persepsi mereka. Survei ini berusaha memperoleh gambaran

mengenai praktik korupsi yang terjadi di institusi publik ketika berhubungan dengan pelaku usaha.

2.1.2.1 Ciri-Ciri & Motif Korupsi

Christoph Stuckelberger menyatakan bahwa korupsi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merupakan sarana untuk mendapatkan sesuatu
2. Jenis kegiatan yang tersembunyi dan tidak transparan
3. Pencarian keuntungan pribadi secara tidak sah
4. Pendapatan sesuatu yang bukan haknya secara tidak sah
5. Penggunaan dana secara tidak efisien
6. Sering berhubungan dengan pemerasan, penyalahgunaan posisi publik, nepotisme
7. Penyalahgunaan kepercayaan, perusakan integritas moral dan etos umum, serta pelanggaran hukum dengan disintegrasi

Saat ini korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Motif melakukan korupsi secara politik yaitu untuk mendapatkan kekuasaan, sedangkan secara ekonomi untuk mendapatkan akses lebih ke sumber-sumber ekonomi untuk mendapatkan akses lebih ke sumber-sumber ekonomi untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Bentuk dan motif korupsi menurut Stueckrlberger, yaitu:

1. Korupsi kemiskinan (*corruption of property*) yang disebut juga sebagai korupsi kecil, yaitu korupsi berakar dalam kemiskinan. Contohnya apabila

pegawai-pegawai pemerintah tidak mendapat gaji yang dapat mencukupi kebutuhannya.

2. Korupsi kekuasaan (*corruption of power*) yang disebut korupsi besar, yaitu berakar dari nafsu untuk memiliki lebih banyak kekuasaan, pengaruh, dan kesejahteraan atau dalam mempertahankan kekuasaan dan posisi ekonomi yang telah dimiliki.
3. Korupsi untuk mendapatkan sesuatu (*corruption of procurement*) dan korupsi untuk mempercepat urusan (*corruption of acceleration*) yaitu untuk mendapatkan barang atau jasa, tanpa korupsi maka memperolehnya akan tidak tepat waktu atau membutuhkan biaya administrative yang lebih besar.

2.1.2.2 Dampak Korupsi

Mboeik berpendapat bahwa Tindakan korupsi telah berakibat pada disharmoni dan disintegrasi bangsa, baik berdasarkan kelompok, golongan atau berdasarkan etnis dan semakin lebarnya jurang perbedaan sosial-ekonomi antara berbagai lapisan masyarakat.

Dampak dari tindakan korupsi digambarkan oleh Gatot Sulistoni, Eryvn Kaffah, dan Syahrul Mustofa dalam tiga kategori, yaitu:

1. Aspek Politik.
 - a. Tindakan korupsi mengakibatkan rusaknya tatanan demokrasi dalam kehidupan bernegara.

- b. Prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tidak akan terjadi sebab kekuasaan dan hasil-hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh para koruptor,
- c. Posisi pejabat dalam struktur pemerintah diduduki oleh orang-orang yang tidak jujur, tidak potensial, dan tidak bertanggungjawab. Hal ini disebabkan karena proses penyeleksian pejabat tidak melalui mekanisme yang benar, yakni uji kelayakan (*Fit and Proper Test*), tetapi lebih dipengaruhi oleh politik uang dan kedekatan hubungan, dan
- d. Proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga proses pembangunan berkelanjutan terhambat.

2. Aspek Sosial

Pada tingkat yang sudah sangat sistematis, Sebagian besar masyarakat tidak lagi dihiraukan aspek profesionalisme dan kejujuran. Hal ini disebabkan karena semua persoalan diyakini bisa diselesaikan dengan uang sogokan. Selain itu, korupsi juga mendidik masyarakat untuk menggunakan cara-cara tidak bermoral dan melawan hukum untuk mencapai segala keinginannya.

3. Aspek Ekonomi

Dampak tindak korupsi terhadap aspek ekonomi contohnya adalah:

- a. Pendanaan untuk petani, usaha kecil, maupun koperasi tidak sampai ke tangan masyarakat. Kondisi seperti ini dapat menghambat pembangunan ekonomi rakyat,

- b. Harga barang menjadi lebih mahal, hal tersebut karena perusahaan harus membayar “upeti” atau “biaya siluman” sejak masa perijinan sampai produksi. Tingginya biaya siluman ini otomatis akan menurunkan tingkat keuntungan usaha dari para pemilik modal/pengusaha, oleh karena itu mereka menekan upah buruh untuk meningkatkan keuntungan,
- c. Sebagian besar uang hanya berputar pada segelintir elite ekonomi dan politik. Realitas seperti ini menyebabkan sektor usaha yang berkembang hanya di sektor elite, sementara sektor ekonomi rakyat menjadi tidak berkembang, dan
- d. Produk petani tidak mampu bersaing. Akibatnya harga-harga produk petani juga meningkat, sehingga tidak mampu meraih keuntungan karena kalah bersaing dengan produk impor.

2.1.3 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani, sehingga rata-rata lama sekolah dapat mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang diukur dalam aspek Pendidikan. Semakin lama rata-rata tahun Pendidikan yang dijalani oleh penduduk di suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula mutu sumber daya manusianya.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Rata Lama Sekolah didefinisikan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung RLS dibutuhkan informasi; partisipasi sekolah, jenjang dan jenis Pendidikan yang

pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, tingkat/kelas tertinggi yang sedang diduduki. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses Pendidikan sudah berakhir.

Menurut Todaro (1998), menyatakan bahwa Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana Pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan maskin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah dapat dirumuskan:

$$I RLS = \frac{RLS}{Jumlah\ Penduduk}$$

Tingkat penghasilan ini sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh Pendidikan. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator tingkat Pendidikan di suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (*human capital*) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk dapat memaksimumkan selisih antara keuangan yang diharapkan dengan biaya-biaya yang diperkirakan, maka strategi optimal bagi seseorang adalah berusaha menyelesaikan pendidikan setinggi mungkin. Investasi dalam modal manusia akan terlihat lebih tinggi manfaatnya apabila kita bandingkan antara total biaya Pendidikan

yang dikeluarkan selama menjalani pendidikan terhadap pendapatan yang nantinya akan diperoleh ketika mereka sudah siap bekerja. Orang-orang yang berpendidikan tinggi akan memulai kerja penuh waktunya pada usia yang lebih tua, namun pendapatan mereka akan cepat naik dari pada orang yang bekerja lebih awal (Todaro, 2000).

2.1.3.1 Teori *Human Capital*

Teori *human capital* merupakan teori yang memperhitungkan bahwa investasi dalam dunia Pendidikan dapat memperbaiki kualitas produktivitas masyarakat, kemampuan masyarakat yang semakin baik. Dengan adanya pendidikan maka seseorang mampu keluar dari lingkungan kemiskinan. Indikator tingkat pendidikan suatu wilayah dapat diukur dari rata-rata lama sekolah. *Human capital* menjadi salah satu bentuk lingkup pendidikan yang dapat menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa salah satu tolak ukur dalam mengukur keberhasilan pembangunan yaitu dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendidikan menjadi salah satu indeks yang digunakan IPM sebagai bahan pertimbangan evaluasi terhadap kenaikan kualitas Sumber Daya Manusia. Metode baru dalam mengukur tingkat pendidikan masyarakat berdasarkan indeks pembangunan manusia adalah dengan melihat Harapan Lama Sekolah (HSL) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Menurut Mankiw dan Gregory memiliki pendapat bahwa unsur pendidikan menjadi salah satu bentuk investasi individu, semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh maka akan meningkat pula

kesejahteraan suatu individu. Hal ini tentu memiliki pengaruh dalam keberlangsungan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang.

2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan *gross domestic product (GDP)/ gross national product (GNP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 2010).

Yang dimaksud dari pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Negara dapat disebut mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi jika terjadi peningkatan GNP rill di negara tersebut. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikasi terhadap keberhasilan dari pembangunan ekonomi.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh

masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga meningkat.

Pertumbuhan ekonomi lebih menunjukkan kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (*final goods and services*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu.

Menurut Todaro (1998), terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah: Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, Perlatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi.

Menurut Sukirno (2011), pertumbuhan ekonomi adalah sebagai sebuah perkembangan dalam kegiatan dalam perekonomian yang mengakibatkan (barang dan jasa) pada kegiatan produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran pada masyarakat meningkat. Berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi diberbagai negara dapat diartikan bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara adalah ketersediaan sumber daya alam dan tanahnya, mutu dan jumlah tenaga kerja, tingkat teknologi yang digunakan, barang modal yang tersedia serta sistem sosial dan sikap masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka Panjang. Penekanan pada pada proses, karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dilihat efektivitasnya.

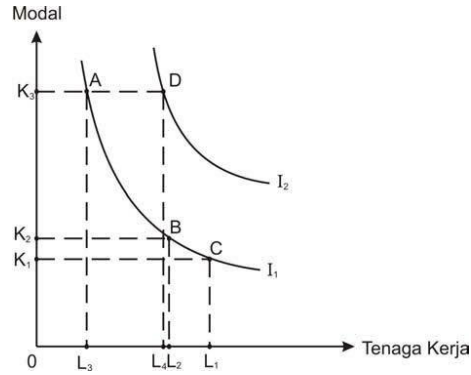
2.1.4.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam teori pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi pemerintah menurut para ahli ekonom, yaitu:

a. Teori Neoklasik (Sollow Swan)

Ekonom yang menjadi perintis dalam pengembangan teori Neoklasik adalah Robert Sollow dan Trevor Swan yang dimulai pada tahun 1950-an. Pada teori ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi.

Sifat dari teori pertumbuhan neoklasik tertuang pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Arsyad (2010)

Gambar 2. 2 Fungsi Produksi Neoklasik

Pada gambar diatas fungsi produksinya ditunjukkan oleh I_1 dan I_2 dan seterusnya. Fungsi produksi tingkat output tertentu dapat diciptakan dengan menggunakan berbagai kombinasi modal dan tenaga kerja, misalnya dalam menciptakan *output* sebesar I_1 , kombinasi modal dan tenaga kerja yang dapat digunakan antara modal lain K_3 dan L_3 , K_2 dan L_2 kemungkinan bahwa tingkat dari *output* tidak mengalami perubahan.

Fungsi ini memungkinkan kombinasi penggunaan K dan L untuk mendapatkan suatu tingkat *output*. Fungsi Solow dan Swan dapat menghindari masalah ketidakstabilan dan mengambil kesimpulan-kesimpulan baru mengenai distribusi pendapatan dalam proses pertumbuhan.

Konsekuensi digunakannya fungsi produksi Neo-klasik adalah seluruh faktor yang tersedia, baik berupa K maupun berupa L akan selalu terpakai atau tergunakan secara penuh dalam proses produksi. Hal ini disebabkan karena dengan fungsi

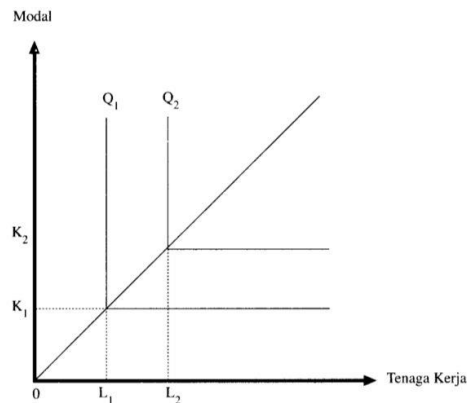
produksi Neo-klasik tersebut, berapapun K dan L yang tersedia akan dapat dikombinasikan untuk proses produksi, sehingga tidak ada lagi kemungkinan “kelebihan” dan “kekuarangan” faktor produksi seperti dalam model Harrod-Domar atau Lewis. Posisi “*full employment*” ini membedakan model Neo-klasik. Jadi jelas bahwa penggunaan fungsi produksi Neo-klasik selalu terdapat *full employment* merupakan ciri utama yang membedakan model ini dengan model pertumbuhan lain.

b. Teori Harrod-Domar

Pada teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar merupakan teori oerluasan dan analisis dari dua orang ekonom sesudah Keynes yaitu Roy F. Harrod dan Evsey D. Donar. Harrod mengemukakan teorinya dalam *Economic Journal* dengan judul *An Essay on Dynamic Theory*. Domar mengemukakan teori pertamanya pada *American Economic Review* dengan judul *Expansion and Employment* pada tahun 1947. Kegiatan ekonomi yang secara nasional dan masalah tenaga kerja. Ada beberapa asumsi yang dituangkan pada teori ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Perekonomian dalam pengerjaan penuh *full employment* dan barang-barang modal yang ada pada masyarakat yang akan digunakan secara penuh.
- 2) Perekonomian terdiri atas dua sektor, yaitu sektor perusahaan dan sektor rumah tangga.
- 3) Besar tabungan masyarakat adalah proposional dengan tingkat besarnya pendapatan nasional, artinya fungsi dari tabungan diawali dari nol.
- 4) Kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propersity to Save=MPS*) besarnya tetap, demikian pula pada rasio antar pertambahan modal *ouput*

(*Capital Output Ratio* = COR) dan rasio antara pertambahan modal *output* (*Incremental Capital Output Ratio*= ICOR), COR dan ICOR yang tetap dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Arsyad (2010)

Gambar 2. 3 Fungsi Produksi Harod-Domar

Menurut teori Harrod-Domar, fungsi produksinya berbentuk L karena dalam sejumlah modal hanya menciptakan sejumlah fungsi *output* tertentu (modal dan tenaga kerja tidak substitutif). Untuk menghasilkan *output* sebesar Q1 maka diperlukan modal sebesar K1 dan pada tenaga kerja sebesar L1 dan apabila pada kombinasi itu berubah maka pada tingkat *output* juga berubah. Misalnya, untuk *output* sebesar Q2 hanya dapat diciptakan dengan stok modal sebesar K2.

c. Teori Schumpeter

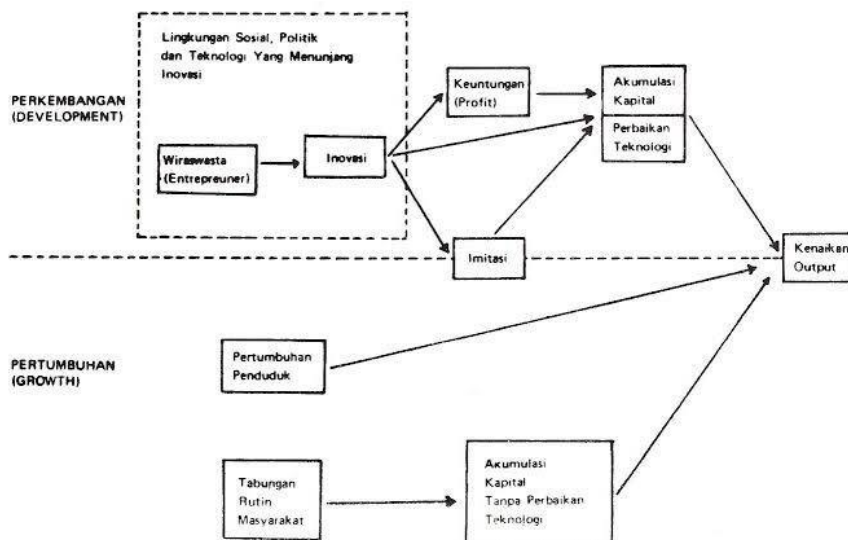
Menurut Arsyad (2010) pada teori Schumpeter yang dikemukakan pada tahun 1934 dan pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Inggris dengan judul *The Theory of Economic Development*. Schumpeter menggambarkan teori ini tentang bagaimana proses pembangunan dan faktor utama dalam menentukan pembangunan dalam

bukunya yang berjudul *Bussines Cycle*. Menurut Schumpeter, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu proses inovasi yang dilakukan inovator atau wiraswasta.

Schumpeter juga mengemukakan ada lima kegiatan yang dimasukkan sebagai inovasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperkenalkan produk baru yang sebelumnya tidak ada
- 2) Memperkenalkan cara berproduksi baru
- 3) Pembukaan pasar-pasar baru.
- 4) Penemuan sumber-sumber bahan mental baru
- 5) Adanya perubahan organisasi industri menuju efisiensi

Teori Schumpeter terdapat diagramatis proses kemajuan ekonomi sebagai berikut:



Sumber: Arsyad (2010)

Gambar 2. 4 Proses Kemajuan Ekonomi Menurut Schumpeter

Pada gambar 2. 4 menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kewirausahaan yaitu kemampuan dalam melihat peluang dalam inovasi pembukaan usaha baru dan perluasan usaha dengan tujuan pembukaan lapangan pekerjaan yang baru pada setiap periode. Ada dua penunjang inovasi tersebut yaitu:

- 1) Adanya cadangan ide-ide baru yang relevan
- 2) Adanya sistem perkreditan (lembaga keuangan) yang dapat menyediakan dana bagi para entrepreneurship untuk dapat merealisasikan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.

2.1.5 Bantuan Sosial

Dalam sebuah pemerintahan akan melakukan pengeluaran atau pembelian agar kegiatan operasional dan roda perekonomian tetap berjalan. Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan dari pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah untuk kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Salah satu untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi dua yaitu konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Konsumsi pemerintah meliputi pembelian atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi seperti, membayar gaji guru sekolah, membeli alat tulis dan kertas untuk digunakan dan bensin untuk kendaraan pemerintah. Sedangkan investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk

membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit, irigasi, beasiswa dan bantuan bencana alam.

Hukum Wagner Adolf Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan ikut meningkat. Wagner menjelaskan peranan pemerintah yang semakin besar karena pemerintah harus mengartu hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya.

Teori Rostow dan Musgrave (Tahir et al., 2022) berpendapat bahwa aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Menurut ahli ekonomi, Bambang Bodjonegoro, bantuan sosial merupakan salah satu instrument kebijakan ekonomi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non-pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Dinas bantuan sosial bida dengan syarat atau tanpa syarat, diberikan melalui kementrian/lembaga, serta untuk bencana alam.

Belanja bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat dalam bentuk transfer uang tunai ataupun dalam bentuk barang. Batasan pengertian anggota/kelompok masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah:

- 1) Individu keluarga atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

- 2) Lembaga non-pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemanfaatan bantuan sosial berdasarkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dikelompokkan menjadi empat bidang yaitu:

- 1) Bidang Pendidikan meliputi program BOS dan Beasiswa Pendidikan Siswa/Mahasiswa miskin.
- 2) Bidang kesehatan meliputi program Jaskesmas dan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit kelas III.
- 3) Bidang pemberdayaan masyarakat (PNPPM Perdesaan mencakup Kecamatan PPK, P2KP, PNPM Perkotaan, PNPM infrastruktur Perdesaan/PPIP, PNM Daerah Tertinggal/PDT, PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah).
- 4) Bidang Perlindungan Sosial, meliputi Program Keluarga Harapan/PKH, dan Bantuan Langsung Tunai/BLT.

2.1.5.1 Risiko Permasalahan Bantuan Sosial

- 1) Proses penyaluran belanja bansos tidak jelas dan tidak transparan.

Salah satu indikasinya adalah tidak adanya standar prosedur operasi untuk proses penyaluran belanja bansos baik kriteria penerima maupun jumlah nominal yang akan disalurkan. Penyaluran dilakukan secara spontan sesuai dengan arahan pimpinan.

2) Penerima belanja bantuan sosial fiktif.

Belanja bantuan sosial fiktif ini terjadi apabila uang belanja bantuan sosial telah dicairkan dan tercatat keluar dari kas daerah, namun tidak diterima oleh pemohon yang seharusnya menerima. Kasus ini seringkali terjadi pada belanja bantuan sosial yang pembayarannya dilakukan secara tunai.

3) Penerima belanja bantuan sosial tidak sesuai dengan kriteria penerima belanja bantuan sosial.

Permasalahan ini terjadi dari tahap penganggaran untuk belanja bansos yang direncanakan maupun pada saat pelaksanaan untuk belanja bansos yang tidak direncanakan. Belanja bansos disalurkan kepada individu/keluarga/masyarakat/ lembaga non pemerintah yang tidak terdampak risiko sosial.

4) Bantuan sosial tidak digunakan sesuai peruntukkan.

Permasalahan ini terjadi dalam hal uang bantuan sosial tersebut tidak digunakan sesuai dengan rencana penggunaan yang dimuat dalam proposal permohonan bantuan sosial. Misalnya, rencana penggunaan bantuan sosial adalah untuk pengobatan, namun digunakan untuk foya-foya.

5) Pemotongan dana bansos atau pemberian *fee* untuk pihak yang telah membantu.

Proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan belanja bansos memerlukan proses yang berbelit menurut sebagian orang. Hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum petugas maupun masyarakat yang mempunyai akses terhadap kekuasaan untuk mengawak usulan nama-nama penerima bantuan sosial dengan harapan

mendapatkan keuntungan materi mau dengan memotong maupun meminta *fee* kepada penerima bansos.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengenai “ Analisis Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Rata-rata Lama Sekolah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Bantuan Sosial Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2000-2022”. Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan penelitian ini.

Tabel 2. 1 Matriks Penelitian Terdahulu

No (1)	Judul, Peneliti, Tahun (2)	Persamaan (3)	Perbedaan (4)	Hasil Penelitian (5)	Sumber (6)
1	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. (Wibowo & Pangestuty, 2023)	Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan	Produktivitas Tenaga Kerja, Upah minimum, dan Investasi	Semua variabel bebas dalam penelitian tersebut berpengaruh signifikan secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia	<i>Journal Of Development And Social Studies</i> , Vol. 2 No. 3, 2023
2	Analisis pengaruh upah minimum provinsi, dan belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia. (Anshari <i>et al.</i> , 2018)	Ketimpangan Pendapatan	Pendidikan, Upah minimum provinsi, dan belanja modal	Pendidikan berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, upah minimum provinsi berpengaruh, dan belanja modal dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	<i>EcoGen</i> , Vol. 1 No. 3, 2018

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Determinan Ketimpangan Pendapatan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2012-2020 (Nabila & Laut, 2021)	Bantuan Sosial, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pendapatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka Berpengaruh Signifikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan, Variabel Bantuan Sosial Tidak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Tidak Berpengaruh Terhadap Ketimpangan Pendapatan	<i>Syntax Idea</i> , Vol. 3 No. 8, 2021
4	Pengaruh Konsumsi Energi, Investasi Asing, Jumlah Penduduk, Indeks Korupsi, Indeks Pembangunan Terhadap Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus : Negara Berkembang Dan Negara Maju) (Yaldi <i>et al.</i> , 2021)	Indeks Persepsi Korupsi dan Ketimpangan Pendapatan	Konsumsi Enegri, Investasi Asing, Jumlah Penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia	Konsumsi energi, investasi asing, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di indonesia. Dan konsumsi energi, investasi asing, jumlah penduduk, indeks persepsi korupsi, indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di negara maju yaitu singapura.	Kumpulan <i>Executive Summary</i> Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Vol. 19 No. 3 (2021)
5	Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 1997-2021. (Karimi <i>et al.</i> , 2023)	Indeks Persepsi Korupsi dan Ketimpangan Pendapatan	Penanaman Modal Asing dan Pengangguran	Variabel indeks persepsi korupsi dan variabel kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, sedangkan variabel penanaman modal asing dan variabel pengangguran berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.	Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, Vol. 13 No.1, 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Analisis Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita, Umur Harapan Hidup, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kawasan Barat Indonesia Dan Kawasan Timur Indonesia Tahun 2010-2020. (S. Dai <i>et al.</i> , 2023)	Rata-Rata Lama Sekolah dan Ketimpangan Pendapatan	Pengeluaran Perkapita, Umur Harapan Hidup, dan Tingkat Kemiskinan	Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, Umur Harapan Hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, Tingkat Kemiskinan.	Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1, 2023
7	Pengaruh PDRB, Angka Harapan Hidup, Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2021 (Valiant Kevin <i>et al.</i> , 2022)	PDRB dan Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Harapan Hidup dan Kemiskinan	Variabel PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variable Angka Harapan Hidup, dan Rata Rata Lama Sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan di kabupaten/kota provinsi jawa tengah tahun 2013 –2021.	<i>Sibatik Journal</i> , Vol. 1 No.12, 2022
8	Peran belanja modal dan belanja bantuan sosial pemerintah daerah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. (Yasni Raynal & Yulianto Heri, 2020)	Belanja Bantuan Sosial dan Ketimpangan Pendapatan	Belanja Modal	Belanja modal dan belanja bantuan sosial secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan provinsi di Indonesia. Sedangkan secara parsial, variabel rasio belanja modal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ketimpangan Provinsi di Indonesia, dan rasio belanja bantuan sosial berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia.	Artikel Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi, Vol. 4 No. 1, 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Pengaruh Ekonomi, Investasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2007-2016. (Febriyani A & Anis A, 2021)	Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan	Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia	Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.	Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 3 No. 4, 2022
10	Analisis Pengaruh Investasi, Indeks Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999-2019 (Ningsih <i>et al.</i> , 2021)	Indeks Persepsi Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi dan Investasi	Variabel Inflasi, Investasi Dan Indeks Persepsi Korupsi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan secara simultan Inflasi, Investasi, Indeks Persepsi Korupsi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.	DINAMIC: <i>Directory Journal Of Economic</i> , Vol. 3 No. 2, 2021
11	Pengaruh Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara Periode 2015-2019 (Syahri & Gustira, 2020)	Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan	Kemiskinan	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.	<i>Journal of Trends Economics and Accounting Research</i> , Vol. 1 No. 1, 2020
12	Pengaruh Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2015-2018 (Khoirudin & Ahmad Dahlan, 2020)	Ketimpangan Pendapatan	Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan	Variabel Pendidikan dan variabel kemiskinan berpengaruh parsial terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel pengangguran tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia.	Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 8 No. 3, 2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Pengaruh Pendapatan dan Produktivitas Pertanian Terhadap Kemiskinan di Provinsi Maluku (Lasaiba, 2023)	Ketimpangan Pendapatan	Produktivitas Pertanian dan Kemiskinan	Tidak ada hubungan yang tidak signifikan antara variabel kemiskinan dan variabel ketimpangan pendapatan. Terdapat hubungan positif antara ketimpangan pendapatan dan perubahan kemiskinan, dan tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel kemiskinan dan Produktivitas Pertanian.	Jurnal Geografi, Lingkungan & Kesehatan, Vol. 1 No.1, 2023
14	Pengaruh IPM, dan Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur (Agustin & Sumarsono, 2022)	Bantuan Sosial	Pengangguran, IPM, dan Kemiskinan	Pengangguran dan IPM berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, sedangkan bantuan sosial tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.	Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, Vol. 7 No. 2, 2022
15	Pengaruh Sekolah, Umur, dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta (Utari Swastika & Arifin, 2023)	Rata-rata Lama Sekolah dan Pertumbuhan Ekonomi	Umur Harapan Hidup, Pengeluaran Perkapita	Rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita berpengaruh positif dan tidak signifikan, umur harapan hidup berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016-2022 pada kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta.	Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 7 No. 3, 2023.
16	<i>The Effect of Corruption Perception Index, Debt, Foreign Direct Investment, Balance of Trade, and Labor on Economic Growth.</i> (Darmawati et al., 2021)	Indeks Persepsi Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi	Neraca Perdagangan dan Utang Luar Negeri	indeks persepsi korupsi, utang luar negeri, neraca perdagangan, <i>foreign direct investment</i> , tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan <i>initial growth</i> menunjukkan tanda positif.	<i>SSRG International Journal of Economics and Management Studies</i> , Vol. 8 No. 6, 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (Nadya & Syafri, 2019)	Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Ketimpangan Pendapatan	Pengangguran	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan, pendidikan berpengaruh positif dan signifikan, dan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.	Media Ekonomi, Vol. 27 No, 1, 2019
18	Analisis Pengaruh Pengeluaran Perkapita, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia tahun 2010-2019 (Laila <i>et al.</i> , 2024)	Pendidikan	Pengeluaran perkapita dan kesehatan	Pengeluaran perkapita berpengaruh negatif dan signifikan, pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan, dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.	Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 1 No. 3, 2024
19	Anlisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur pada tahun 2011-2019 (Bhagaskara, 2023)	Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan	Upah minimum, Angkatan kerja, indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah, dan investasi	Laju pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan, sementara upah minimum, indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah, dan investasi memiliki pengaruh signifikan, angkatan kerja yang bekerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	<i>Journal of Development and Social Studies</i> , Vol. 2 No. 4, 2023
20	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Ketimpangan Kota-Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Nurafifah <i>et al.</i> , 2022)	Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan	Investasi	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan, investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisien, Vol. 22 No. 5, 2022

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, akan meneliti yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan menguji empat variabel. Empat variabel tersebut dipilih dengan pertimbangan landasan teori dari pendapat beberapa ahli serta dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan analisis penyebab ketimpangan pendapatan. Variabel tersebut adalah indeks persepsi korupsi, rata-rata lama sekolah, laju pertumbuhan ekonomi, dan bantuan sosial.

2.2.1 Hubungan Indeks Persepsi Korupsi dengan Ketimpangan Pendapatan

Korupsi yang tidak ditanggulangi dengan baik akan menyebabkan ketimpangan Indonesia yang mengalami perbedaan pendapatan lebih dalam. Korupsi menciptakan ketimpangan pendapatan dengan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi Indonesia kaya untuk melakukan suap, sementara Indonesia miskin menderita karena tingginya biaya layanan Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Chetwynd *et al.* dalam Falah & Suman (2018) bahwa korupsi menyebabkan ketimpangan pendapatan meningkat. Senada dengan Karimi *et al.* (2023) menemukan bahwa semakin rendah tingkat korupsi pada suatu negara maka mendorong ketimpangan pendapatan pada tingkat yang lebih rendah.

Beban yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap penghasilan akan berbeda pada setiap individu. Individu yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan rendah akan merasakan dampak yang lebih tinggi dari pada individu yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan tinggi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Darmawati *et*

al. (2021) korupsi mendistorsi peran redistributif pemerintah, hal ini juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dengan mudah dan tidak bisa lepas dari reformasi negara. Jika reformasi tertentu tidak dilakukan, korupsi kemungkinan akan terus menjadi masalah, terlepas dari tindakan yang secara langsung ditujukan untuk memberantasnya. Penekanan pentingnya dalam menangani korupsi juga disampaikan oleh Gupta dalam Febriani et al. (2022) dengan menggunakan sampel kecil dari beberapa negara, menemukan hubungan positif dan linier antara korupsi dan ketimpangan pendapatan, pernyataannya menegaskan bahwa korupsi yang tinggi dan semakin meningkat akan berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Disimpulkan bahwa kebijakan mengurangi korupsi berpeluang besar untuk mempersempit celah ketimpangan pendapatan di masyarakat.

2.2.2 Hubungan Rata-rata Lama Sekolah dengan Ketimpangan Pendapatan

Rata-rata lama sekolah diasumsikan lama sekolah yang ditempuh sesuai dengan masa sekolah dalam waktu yang normal. Dimana lama sekolah 6 tahun setara dengan masa lulus Sekolah Dasar (SD), lama sekolah 9 tahun setara dengan lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP), lama sekolah 12 tahun setara dengan lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), kemudian lama sekolah 16 tahun setara dengan lulus jenjang perkuliahan atau S1 dan seterusnya. Tenaga kerja yang produktif serta memiliki kualitas yang mumpuni akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang kemudian dalam jangka panjang akan mengurangi ketidakmerataan penyebaran pendapatan. Maka, dapat diasumsikan bahwa rata-rata lama sekolah seseorang penduduk akan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan

jika diiringi dengan produktivitas yang sesuai pada jenjang pendidikan yang telah ditempuh.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia pada tahun 2010-2020 terjadi karena ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam memperoleh pendidikan sehingga sebagian masyarakat di Indonesia, baik yang berada di kawasan barat Indonesia maupun di kawasan timur Indonesia khususnya di daerah-daerah terpencil dan juga tertinggal hanya dapat memperoleh pendidikan yang terbatas, sedangkan sebagian lainnya yang tinggal di daerah-daerah yang lebih baik mendapatkan pendidikan yang luas. Hal inilah yang dapat menimbulkan adanya ketimpangan pendidikan di Indonesia, (Indrayani et al.,2023). Berbeda dengan penelitian (Muamar & Az, 2018) Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh secara signifikan dan berdampak negatif terhadap ketimpangan di luar Pulau Jawa. Sejalan dengan yang terjadi di Pulau Jawa, tingkat pendidikan menjadi penentu masalah ketimpangan di luar Pulau Jawa, dimana ketika pendidikan tinggi maka tingkat produktivitas individu akan berjalan beriringan dan akan berdampak pada kesejahteraan yang lebih baik pula.

2.2.3 Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan

Kuznets melalui penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa korelasi pertumbuhan dan ketimpangan sangat kuat, pada permulaannya pertumbuhan

ekonomi akan menyebabkan peningkatan ketimpangan yang disebabkan belum meratanya distribusi pendapatan, namun setelah tahapan yang lebih lanjut pemerataan akan semakin tercapai kemudian tingkat ketimpangan akan mengalami penurunan. Kuznets menggambarkan pola peningkatan dan penurunan tersebut dengan metode U terbalik yang ia ciptakan setelah meneliti kesenjangan di berbagai negara (Febrianto, 2017).

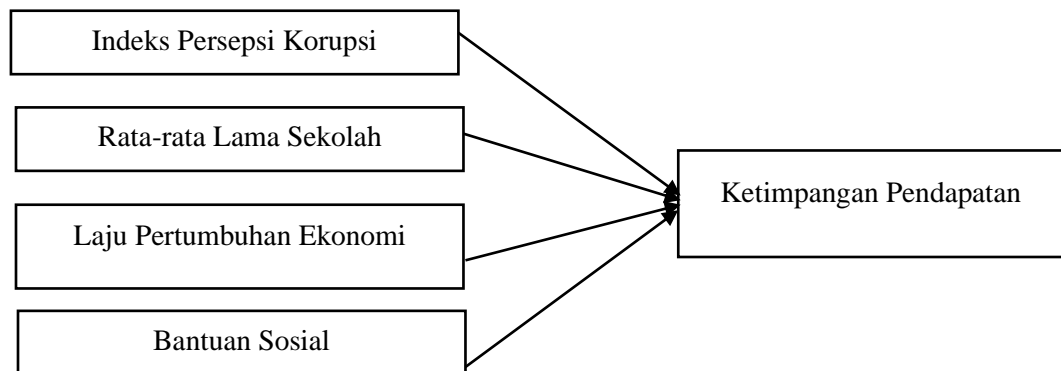
Ketimpangan pada negara sedang berkembang relatif lebih tinggi karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik sedangkan daerah yang masih terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan sarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itulah pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat di daerah dengan kondisi yang lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan (Nurafifah et al., 2022).

Berdasarkan hasil analisis Nabila & Laut, (2021) yang dilakukan dalam penelitian pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2012-2020. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wahyuni & Adriyani (2022) pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh.

2.2.4 Hubungan Bantuan Sosial dengan Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian Nabila & Laut (2021), belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Tidak adanya pengaruh signifikan ini

dapat disebabkan oleh nilai belanja bantuan sosial pemerintah daerah yang secara rasio belanja kecil dari total belanja pemerintah daerah. Mungkin di satu sisi, belanja bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat dapat membantu menambah pendapatan mereka. Namun, menurut Akita dalam Raynal & Heri (2020), mengatakan bahwa pendapatan yang tinggi tidak membawa pengaruh signifikan terhadap ketimpangan, sehingga diduga ketimpangan bukan karena banyak sedikitnya uang dalam perekonomian, namun akses masyarakat. Dalam penelitian ini, tidak ditemukan fakta memadai bahwa memberikan bantuan sosial akan mengurangi ketimpangan, namun diakui bahwa bantuan sosial membantu untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Secara sistematis kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 5 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2019), adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan hubungan antara variabel dalam kerangka pemikiran, maka dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga indeks persepsi korupsi, rata-rata lama sekolah, laju pertumbuhan ekonomi dan bantuan sosial secara parsial berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2000-2022.
2. Diduga indeks persepsi korupsi, rata-rata lama sekolah, laju pertumbuhan ekonomi, dan bantuan sosial bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2000-2022.